KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Global Legislative Openness Conference 2017 - Open Parliament Tingkatkan Kepercayaan Publik
Tanggal : Rabu, 31 Mei 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Global Legislative Openness Conference 2017

Open Parliament Tingkatkan Kepercayaan Publik

FOTO DOKUMEN DPR

● Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada Global Legislative Openness Conference 2017 di Kiev, Ukraina

Saat ini rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara termasuk kepada parlemen sudah menjadi permasalahan di seluruh negara demokrasi. Oleh sebab itu perlu adanya *open government* dan *open parliament* penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Pendapat tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada Global Legislative Openness Conference 2017 di Kiev, Ukraina, Jumat (19/5).

Fadli yang tampil sebagai pembicara pada sesi pertama menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap parlemen. "Di Indonesia, kepercayaan publik terhadap DPR berada pada *level* 48,5 persen pada 2016 menurun dari 2015 yang mencapai 59,2 persen," ungkap Fadli Zon yang juga President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).

Angka tersebut menurutnya masih sangat tinggi dibanding negara-negara lain yang umumnya di bawah 50 persen. "Bahkan di Amerika Serikat hanya 19 persen," tambahnya.

Menurutnya ada tiga penyebab yang dari persoalan diatas. Pertama, *public trust* sangat terkait dengan kapasitas institusi dan juga kemampuan para anggota parlemen. Kedua, kepercayaan publik juga terkait dengan beragamnya orientasi politik yang ada di masyarakat. Dan ketiga, dari hasil studi ditemukan bahwa tingkat *public trust* juga terkait dengan sistem elektoral yang dijalankan.

Penerapan kerangka *open parliament*, menurut Fadli Zon penting untuk membantu meningkatkan kepercayaan publik. Namun, hal tersebut bukan faktor tunggal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

"Sebagai sebuah prinsip, keterbukaan institusi parlemen adalah aspek yang penting. Namun implementasi teknisnya di setiap negara tak bisa sepenuhnya seragam. Ada perbedaan dimensi sejarah dan budaya, yang juga harus dipertimbangkan," ujarnya.

Fadli menekankan bahwa *open parliament* juga harus didukung oleh peran aktif semua aktor, termasuk publik, dalam memahami proses politik di dalam setiap institusi negara.

Kerangka strategis

Sebab, proses politik di dalam lembaga negara bagaimanapun bukan proses yang sederhana. Bahkan cukup kompleks. Sehingga, publik juga harus dibekali dengan pemahaman yang utuh agar upaya *open government* dan *open parliament* dapat berjalan secara konstruktif.

Menurut Fadli Zon terkait dengan prinsip *open parliament*, DPR RI telah menyusun rencana strategis. Di dalamnya terdapat prinsip tranparansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan keterwakilan. Dengan ketiga hal itu, DPR berupaya kuat untuk membuka ruang pelibatan publik yang lebih luas dalam aktivitas keparlemenan.

Karena itu beberapa upaya prinsip Open Parliament yang sudah dilakukan oleh DPR antara lain, memperluas saluran komunikasi melalui sosial media dan website, mengembangkan SILEG (Sistem Informasi Legislasi), menyediakan personal blog bagi seluruh anggota dewan, mengembangkan TV Parlemen, dan juga mendorong hadirnya rumah aspirasi di setiap daerah pemilihan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon diundang sebagai pembicara pada sesi utama dalam Open Global Legislative Openness Conference di Ukraina, oleh House of Democratic Partnership. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan lebih dari 50 negara, baik anggota parlemen, masyarakat sipil, serta Organisasi Internasional seperti PBB, UNDP, NATO, dan Uni Eropa.

Selama di Ukraina, Fadli dan anggota DPR Amelia Anggraini mengadakan pertemuan bilateral dengan deputi menteri pertahanan Ukraina Ivan Rusnak dalam rangka meningkatkan kerja sama pertahanan.

Selain itu kedua anggota DPR ini sempat mengunjungi MM Gryshko National Botanical Garden dan Miniatur Indonesia di *Miniature Park* di Kota Kiev. Lokasi tersebut disediakan oleh pemerintah Ukraina kepada Pemerintah Indonesia untuk dibangun anjungan Indonesia.

Duta Besar Indonesia untuk Ukraina Yuddy Chrisnandi mengatakan pembangunan anjungan Indonesia di Botanical Garden dan *Miniature Park* ini telah mendapat izin dari pemerintah Ukraina.

Yuddy mengatakan, rencana pembangunan anjungan dan miniatur Indonesia ini mendapat dukungan dari pemerintah Ukraina. Hal itu ditunjukkan dengan cepatnya proses pemberian izin oleh pemerintah Ukraina saat rencana tersebut diajukan oleh pihak KBRI.

Nantinya di dua tempat wisata tersebut akan dibangun taman yang menampilkan karakteristik sesuatu yang menjadi ciri khas Indonesia dan juga sejumlah miniature objek wisata seperti candi Borobudur, Monas hingga Masjid Istiqlal. ● ril